

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uni Soviet (1934-1989) merupakan salah satu negara adidaya di bagian timur. Selama ini, Uni Soviet Berjaya, karena adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, ideology komunis, dan penyerbuan-penyerbuan ke Negara-negara Eropa Timur., berlangsunglah “Perang Dingin”.

Revolusi yang terjadi di akhir dekade abad 20 , setelah Presiden Mikhail Gorbachev merancang *Perestroika dan Glasnot*. Gerakan reformasi dan keterbukaan yang mengakibatkan keruntuhan sistem komunis internasional, dan membawa kehancuran Uni Soviet yang telah dibangun selama lebih kurang 7 dasawarsa. Uni Soviet secara resmi berakhir pada tanggal 25 desember 1991 ketika presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran diri menyusul kemelut politik sebagai kelanjutan kudeta yang gagal pada pertengahan Agustus 1991. Bersamaan dengan hal itu, Uni Soviet yang merupakan salah satu kekuatan hegemoni di dunia ikut menghilang.

Setelah runtuhnya Uni Soviet terbentuklah Federasi Rusia pada tanggal 12 Juni 1990 dalam sidang Pertama wakil rakyat Soviet (RSFSR).¹ Pada tanggal itu pula Boris Yeltsin diangkat sebagai pemimpin Dewan Tertinggi RSFSR. Kondisi perekonomian yang telah diwariskan Uni Soviet membawa masyarakat Rusia

¹ A.Fahruroddi, “ *Rusia Baru Menuju Demokrasi : Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 101-102.

dalam kesengsaraan. Sehingga sebagai Presiden pertama Rusia, Yeltsin mengawali pemecahan masalah ekonomi baik infra struktur maupun supra struktur melalui Konsensus Washington. Konsensus Washington dianggap sebagai salah satu jalan menuju kemakmuran Rusia. Yeltsin merancang bahwa Rusia akan menjalankan reformasi ekonomi menuju mekanisme pasar secara radikal, namun kebijakan Yeltsin ini mengalami kegagalan. Dan hal ini menyebabkan kemunduran Yeltsin sebagai Presiden Federasi Rusia.

Hasil Pemerintahan Yeltsin selama lebih kurang satu decade dipenuhi dengan banyak permasalahan yang membawa Rusia ke dalam resesi multidemensi tahap lanjut apalagi pada pemerintahan Yeltsin dipenuhi dengan permasalahan korupsi yang merajalela. Korupsi ini disebabkan oleh oligarki-oligarki bentukan pemerintahan Yeltsin yang memberikan keleluasaan dalam kepemilikan individu.

Putin menyadari keterpurukan yang dihadapi bangsa Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet bisa menjerumuskan Rusia ke ambang disintegrasi apabila tidak diambil satu langkah definitive untuk menyelamatkannya. Era Vladimir Putin memperlihatkan arah kebangkitan Rusia dari keterpurukan. Pemerintahan Boris Yeltsin memang telah mewariskan struktur perekonomian yang dipersiapkan menuju pasar bebas. Privatisasi dan kepemilikan pribadi atas tanah, perbankan memang telah diperkenalkan, namun dampak negatif dari perubahan itu meninggalkan berbagai persoalan krusial yang harus dipecahkan.

Permasalahan perekonomian tetap menjadi perhatian utama, mengingat

dalam pengambilan keputusan baik dalam persoalan domestik maupun internasional. Untuk itu sebagai kepala pemerintahan dingkat Mikhail Kasyanov, seorang ekonom dan mantan Menteri Keuangan era Yeltsin diharapkan mampu menangani perekonomian Rusia dalam upaya mengeluarkan diri dari krisis yang berkepanjangan. Setelah menempati posisi tertinggi dalam Kremlin, Presiden Putin segera mengumumkan beberapa program reformasi di bidang ekonomi dalam upaya mengeluarkan Negara dari kemelut krisis warisan pemerintahan sebelumnya.

Tabel 2.1

Perkembangan Ekonomi Rusia

Pada Masa Pemerintahan Boris Yeltsin Tahun 1996-1999²

	1996	1997	1998	1999
GDPP	-3,6	1,4	-5,3	6,4
Industrial Product, %	-4,5	2,0	-5,2	11,0
Fixed Investment,%	-18,0	-5,0	-12,0	5,3
Unemployment, % (end of priode)	9,3	9,0	11,8	11,7
Exports, \$ billion	89,7	86,9	74,4	75,6
Import, \$ billion	68,1	72,0	58,0	39,5
Current Account, \$ billion	10,8	-0,1	0,2	24,6
Inflation (CPI), 12 month, %	22	11,0	84,4	36,5

Source: Goskamsat, CBR

Tabel 2.2
Perkembangan Ekonomi Rusia
Pada Masa Pemerintahan Vladimir Putin
Tahun 2000-2007³

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
GDP	10,0	5,1	4,7	7,3	7,2	6,4	6,7	7,0
Industrial Product, %	11,9	4,9	3,7	7,0	8,3	4,0	3,9	7,5
Fixed Investment, %	17,4	10,0	12,6	12,5	13,7	10,5	12,6	19,9
Unemployment, % (end of priode)	10,2	9,0	7,1	8,9	8,0	7,6	7,1	7,1
Exports, \$ billion	105,0	101,9	107,2	134,4	13,9	243,6	304,5	355,5
Import, \$ billion	44,9	53,8	61,0	74,8	8,4	125,3	163,9	223,4
Current Account, \$ billion	46,8	35,0	72,8	39,1	57,0	87,4	94,5	21,8
Inflation (CPI), 12 month, %	20,2	18,6	15,1	12,0	11,7	10,9	9,0	4,0

Source: Goskamsat, CBR

Dapat dilihat perbandingan kedua tabel tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi perekonomian Rusia dari tahun ke tahun pada masa pemerintahan Vladimir Putin. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan ekspor Rusia dan peningkatan investasi dan jumlah pengangguran dapat ditekan pada Pemerintahan Putin dari 11,7 % menjadi 6,2 %, dilihat dari ekspor barang-barang Rusia mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan kebijakan pemerintah Vladimir Putin di sektor ekonomi pasar bebas dari 75,6 menjadi 355,5.

³ BOFIT Basic Review (3 0 March 2004), dalam www.bofit.se/bofit/, diakses tanggal 13 Mei 2005

B. Pokok Permasalahan

Dari persoalan diatas, maka dapat diambil sebuah pokok permasalahan yakni :
“Bagaimana Kebijakan Vladimir Putin dalam meningkatkan perekonomian Rusia periode 2000-2007 ?

C. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Investasi

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbale balik tersebut terjadi karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, semakin besar pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Semakin besar investasi suatu Negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.⁴

Salah satu teori ekonom terkenal yang menganalisa hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan adalah Teori Harrod-Domar. Menurut Harrod-Domar setiap perekonomian dapat menyisihkan dari pendapatan nasional untuk menggantikan barang-barang modal rusak, seperti: gedung-gedung, peralatan, material, dan sebagainya. Untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal.⁵

⁴ Yonathan S. Hadi, *Analisis Vector Auto Regresion (VAR) Terhadap Korelasi Antara Pendapatan Naional dan Investasi Pemerintah Indonesia, 1983/1984-1999/2000*, dalam *Jurnal Keuangan dan Moneter* vol 6 no. 2.

⁵ Irwan M. Suparman, *Ekonomi Pembangunan*, PEEF, Yogyakarta, 1999.

Investasi bisa berarti investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintahan, masyarakat dan swasta. Investasi oleh pemerintah dapat dilihat dari:

a. Investasi fisik

Berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi non fisik

Adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah berupa penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya. Investasi ini dikenal juga human investment. Selain itu, bagi daerah yang mampu juga mengadakan investasi berupa pembentukan modal pada dunia usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Investasi dunia usaha di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyak investasi dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Setiap perekonomian pada dasarnya harus senantiasa mencadangkan/ menabung sebagian dari pendapatan nasional untuk menambah barang-barang modal, seperti gedung, alat-alat, dan bahan baku yang telah rusak. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan

sebuah investasi yang merupakan tambahan dari netto terhadap cadangan/ stok modal. Investasi juga bisa didapat dari sumber daya manusia akan membawa dampak positif terhadap angka produksi bila dapat meningkatkan kualitas modal manusia, yaitu melalui pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan berupa magang, kursus-kursus, dan pendidikan informal lainnya yang dapat mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil.⁶

Sejak tahun 2000, Kremlin dibawah pemerintahan Vladimir Putin yang memosisikan dirinya sebagai seorang Siloviki, mereka memiliki semboyan Rusia adalah untuk Rusia, dimana distribusi kemakmuran yang merata bagi semua masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, membangun suatu model ekonomi yang seimbang, dan menciptakan iklim investasi yang bagus sehingga akan mendatangkan aliran modal. Menurut Putin adanya krisis ekonomi 1998, karena ketergantungan ekspor minyak dan gas, buruknya manajemen, serta kurangnya investasi modal.

Demi kepentingan peningkatan ekonomi Rusia Putin menekankan perlunya integrasi Rusia ke lembaga-lembaga ekonomi dan Negara-negara lainnya untuk menarik investasi. "Tanpa integrasi ke dalam struktur ekonomi internasional, kita tidak hanya dapat meningkatkan diri ke tingkat kemajuan ekonomi dan sosial, yang telah dicapai Negara-negara maju."⁷ Hal ini ditandai

⁶ Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan, Erlangga, Jakarta, 2003, hal 92-93.

⁷ Vladimir Putin, "Rossiia na rubezhe tysiacheletii" (Rusia di Belok dari Milenium), *Nezavisimaia gazeta* (30 Desember 1999), reprinted di *Vneshniaia politika i bezopasnost sovremennoi Rossii 19912002* (Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Kontemporer Rusia, 19912002), ed . Anatolii V. Tokunoy et al. vol. Anatolii V. Tokunoy dkk. Vol. 1 (Moscow: ROSSPEN, 2002) p. 1

dengan adanya Rusia membuka hubungan diplomatik dengan sejumlah Negara, seperti Cina, Inggris, Polandia.

2. Konsep Nasionalisasi

Dalam usaha peningkatan kesejahteraan, Negara perlu melakukan nasionalisasi 'expropriation', yang sudah tentu menimbulkan pertanggungjawaban Negara. Nasionalisasi adalah pengambilan perusahaan asing yang kemudian menjadi milik nasional atau Negara yang dikuasai oleh pemerintah untuk penerapan kebijaksanaan ekonomi Negara. Nasionalisasi merupakan tindakan yang sangat penting dan berpengaruh terhadap Negara. Nasionalisasi dulu sering dilakukan oleh Negara-negara komunis yang dipelopori Uni Soviet, Negara-Negara Asia – Afrika dan Negara- Negara Eropa Barat. Ini dianggap sebagai syarat esensial untuk pelaksanaan pembangunan dan dalam kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial Negara.⁸

“Nasionalisasi adalah pengambilan kepemilikan swasta dalam sektor-sektor ekonomi, industry, keuangan, atau lembaga-lembaga pelayanan oleh pemerintah. Proses pemilikan sesuatu yang semula milik orang asing menjadi milik Negara dapat diikuti dengan pergantian, atau tanpa penggantian ganti rugi.”⁹

Ada beberapa alasan mengapa nasionalisasi dilakukan, dikutip dari buku Hukum dan Hubungan Internasional, oleh M. Burhan Tsani, yaitu :

⁸ M.P. Dj. Tjani, *Konsep dan Pelaksanaan Nasionalisasi*, Jakarta, 1963, hal. 51

1. Nasionalisasi adalah untuk memenuhi dana Negara guna melangsungkan aktifitas kesejahteraan sosial yang disebabkan tidak adanya penghasilan Negara yang memadai.
2. Kebijakan Negara menghendaki dilakukan nasionalisasi.
3. Perusahaan asing sering dianggap hanya merupakan pengaliran devisa kenegara asing, dengan reatriasi keuntungan kenegaraan.
4. Kecurangan terhadap aktifitas bisnis dan menggunakan hal itu sebagai pijakan Negara penjajah dalam menguasai daerah jajahan, perusahaan asing, perusahaan multinasional.
5. Nasionalisme sebagai upaya untuk menghilangkan pemerintahan yang colonial, sebab perusahaan asing merupakan wujud terakhir kolonialisme.

Sebuah Negara yang berdaulat mempunyai hak yang sah atas pengambilan kebijakan nasionalisasi dan mempunyai hak inheren dalam penanganan harta maupun usaha yang ada diwilayahnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak ada perjanjian internasional atau jaminan pemerintah terhadap modal asing, Negara bebas menasionalisasi harta kekayaan asing manapun dengan pembayaran kompensasi.¹⁰ Dalam kasus ini, yang paling berkenaan dalam alasan nasionalisasi adalah kebijakan Negara yang menghendakinya. Negara bebas menasionalisasi sehingga apapun alasannya keputusan itu bisa dilaksanakan baik oleh pemimpin

Proses swastanisai dikeluarkan oleh Boris Yeltsin merupakan konsekuensi logis dari upaya Rusia menuju system ekonomi pasar bebas. Artinya, bentuk komunal dan sebagian kepemilikan Negara harus dialihkan kepada kepemilikan swasta/pribadi. Proses ini pada gilirannya memunculkan kelompok baru dalam masyarakat Rusia, yakni orang-orang yang berhasil menguasai perusahaan-perusahaan yang selama ini dikelola oleh Negara. Proses swastanisasi yang terjadi di Rusia pada gilirannya menguntungkan kelompok tertentu, khususnya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.¹¹

Dari sinilah terbentuk kelompok kecil orang-orang yang kemudian menguasai sumber-sumber yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti minyak, listrik, gas, dan sumber-sumber vital lainnya. Para orang-orang kaya baru (OKB) ini kemudian memiliki kekuasaan yang besar, terlebih didukung oleh struktur politik yang ada. OKB yang kemudian dikenal dengan oligarkh ini membentuk lingkaran dalam (inner circle) yang mendukung sekaligus memanfaatkan kekuasaan Boris Yeltsin.¹² Yang tidak membayar pajak sama sekali. Banyak baron perampok di AS, namun setidaknya mereka membangun bisnis dari ketiadaan. Sebaliknya, oligarki Rusia memiliki bisnis dari kekayaan Negara yang justru membuat Negara bangkrut. Sepak terjang oligarki sudah terlalu menakutkan. Bahkan oligarki tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan bagi siapa saja yang menghalangi bisnis mereka. Orang yang mengalami kediktatoran Putin yakni Mikhail Khodorkovsky. Penangkapan ini dianggap sebagai pelecehan terhadap kepemilikan pribadi di Rusia dan ancaman

terhadap proses swastanisasi. Khodorkovsky adalah baron muda memiliki kekayaan 8 miliar dollar AS di awal tahun 2000-an. Khodorkovsky mencoba taktik sendiri, antara lain dengan menerapkan transparansi dalam system keuangan perusahaan.

Khodorkovsky menggunakan penasehat hukum dan ahli keuangan Barat. Karyawan digaji dengan benar, laporan keuangan diterbitkan secara rutin. Karena itu ia disukai asing, yang yakin bahwa kemerdekaan bisnis dan aturan main hukum telah bercokol di Rusia. selain menanamkan keterbukaan, ia merangkul asing, khususnya AS. Ia merencanakan penjualan sahamnya di Yukos. Rencana selanjutnya Yukos, akan demerger dengan ExxonMobil. Para oligarki dinilai telah menggelapkan setidaknya 50 miliar dollar AS dari kekayaan Rusia dan sekitar 200 miliar dollar AS dana-dana Rusia kini melayang ke luar negeri.

Pada akhir 1998 pemerintahan Rusia mengalami deficit anggaran sebesar 6,00% dari GDP Rusia dengan pendapatan yang dimiliki GDP sebesar 11,4% dan pengeluaran GDP 17,4%. Pada tahun 1999 defisit anggaran sedikit turun ke 4,2% dari GDP.¹³ Pada Oktober 2003 Vladimir Putin mengambil alih sektor-sektor strategis seperti Perusahaan minyak Yukos milik Mikhail Khodorkovsky, dengan alasan penggelapan pajak dan dikenal dekat dengan kekuasaan pada era Yeltsin. Pada akhirnya pemerintah menahan aset-aset Yukos untuk membayar pajak dan menjual aset tersebut dibawah nilai pasar pada Rosneft suatu perusahaan minyak milik Negara. Pada 2005-2007 pemerintah Rusia memfokuskan industry minyak melalui Gazprom, dalam hal ini Negara mengawasi perusahaan-perusahaan yang

¹³ ERPD, Economic Statistics and Forecasts. [<http://www.ebrd.org>]

memonopoli eksplorasi dan produksi gas. Suatu ketika Gazprom membeli Sakhalin perusahaan energy yang dipimpin oleh Shell Oil dan TNK-BP.

Pada tahun 2004 hingga 2006 pemerintah mengambil perusahaan pertahanan militer Rosoborn yang dikendalikan oleh Avtovaz. Pada tahun 2007 pemerintah menyatukkan perusahaan penerbangan kedalam Gabungan Perusahaan Penerbangan (UABC), pemerintah mengawasi perusahaan ini sekitar 51%, dan sisanya kombinasi perusahaan penerbangan Rusia lainnya. Sehingga hak kekayaan pemerintah meningkat 20% pada 2003 dan 30% pada awal 2006.¹⁴ Pembekuan privatisasi merupakan langkah dalam mengatur perusahaan-perusahaan pada satu manajemen pemerintahan Rusia sesuai dengan sektornya masing-masing, dalam mempermudah kepastian hukum bagi investor berupa jaminan. Jaminan bagi investor asing antara lain: jaminan stabilitas keamanan, suku bunga yang rendah, dan perlindungan bagi investasi asing. Jaminan ini menarik investor asing sehingga pada Investasi. Rusia telah mengalami peningkatan tujuh kali lipat sekitar \$ 10 miliar dan sampai \$ 25 miliar, pada tahun 2007 inflow modal sebesar \$ 82,3 miliar.¹⁵

Keterkaitan dengan produktifitas Rusia melakukan perdagangan salah satunya penjualan produk senjata meningkat dalam dua tahun terakhir AVPK memperoleh dana US\$ 4 miliar. Kini Rusia menempati urutan ketiga dalam daftar Negara yang memiliki cadangan devisa terbesar dengan sekitar 400 miliar

¹⁴ OECD. The Investment Environment 2006. hal.38

¹⁵ Dikutip dari: Rusia Ministry Finance [<http://www.minfin.ru>], Strategi Pembangunan Rusia

dolar AS (setelah Jepang dan RRC). Ia juga memiliki dana stabilisasi sebesar lebih dari 80 miliar dolar AS.¹⁶ Reformasi dan penegakkan hukum membutuhkan pemerintahan yang kuat. Hanya cara ini yang bisa mengembalikan kekayaan swasta ke Negara dan memberi keuntungan relative merata pada segenap rakyat.

D. Hipotesa

Kebijakan-kebijakan Vladimir Putin dalam peningkatan ekonomi Rusia 2000-2007, dalam bidang investasi, financial, moneter. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menarik beberapa hipotesa dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Memasukkan Dana dari Luar Negeri dengan menciptakan Iklim Investasi.
2. Kebijakan Nasionalisasi, pengalihan aset-aset swasta kepada pemerintah.

F. Metodologi Penulisan

Dalam melakukan penulisan, penulis mencari data berdasarkan pada penelitian kepustakaan, sebagai sumber penulisan dalam pencarian data-data adalah :

- a. Buku-buku Ilmiah, Jurnal, majalah, buletin, surat kabar, dan media-media lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.
- b. Internet / situs.

¹⁶ Linda Tangdialla, (Wartawan Bisnis Indonesia yang mengikuti pelatihan Jurnalistik New Media di Praha bersama wartawan dari Eropa Timur) " Putin, Tiger yang misterius" diakses melalui

G. Jangkauan Penulisan

Didalam penulisan ini, penulis menggunakan batasan waktu dari proses Vladimir Putin menjabat Presiden 2000-2007.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan ini dibagi dalam 5 Bab dan disusun secara sistematis:

BAB I. PENDAHULUAN

Yaitu memberikkan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pemikiran serta memuat beberapa aturan penulisan. Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasr teori, hipotesis, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. PANDANGAN UMUM MENGENAI SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN RUSIA

Mengenai sejarah pembentukan Federasi Rusia, letak Gegografis Rusia, Sistem Pemerintahan rusia, dan Kebijakan Ekonomi Era Yeltsin.

BAB III. KEBIJAKAN EKONOMI VLADIMIR PUTIN

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yakni berupa kebijakan Fiskal yang mengatur perpajakan di berbagai sektor, kebijakan investasi yang mengatur jaminan dan perlindungan investasi, kebijakan balanced budget

yang mengatur dana cadangan, kebijakan ekspor-impor yang mengatur perlindungan ekspor-impor Rusia.

BAB IV. ANALISIS KEBIJAKAN VLADIMIR PUTIN TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN RUSIA

Pada bab ini menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi tidak lancarnya Kebijakan Ekonomi Rusia, seperti adanya kebijakan investasi menghambat industry kecil, kebijakan ekspor-impor membuat masyarakat tergantung pada makanan impor, dan akibat kebijakan fiskal menurunnya harga minyak dunia sehingga menurunnya perpajakan dan stabilisasi dana.

BAB V. KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini pada prinsipnya merupakan penegasan kembali jawaban atas pertanyaan yang ada pada pokok permasalahan sekaligus sebagai pembuktian